

**IMPLEMENTASI PENGUATAN PEMERINTAHAN DESA
BERBASIS *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA JUNREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

Muhammad Efendi

2018210055

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Good governance ialah sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang baik dan juga pertanggungjawaban sesuai prinsipnya demokratis dan keefisienan pasar dan juga pengalokasian tidak terjadi kesalahan serta korupsi yang dicegah dengan cara politik dan juga administratif. Penelitian yang bertujuan 1) Untuk mengetahui Implementasi Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good governance* di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, 2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Penguatan Pemerintahan Desa berbasis *Good governance* di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Triangulasi Teknik, yaitu Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dengan hasil untuk mencapai Pemerintahan berbasis Good governance, pertama yang dilakukan Pemerintahan Desa Junrejo ialah menanamkan Niat yang baik dalam melayani masyarakat, saling bekerja sama, saling berdiskusi, saling berkomunikasi dalam setiap kegiatan melayani masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis good governance di Desa Junrejo kecamatan Junrejo Kota Batu melalui aspirasi masyarakat saran dan masukan masukan. Transparansi yang dilakukan Pemerintahan Desa Junrejo, dalam perencanaan anggaran sudah sangat terbuka masyarakat dapat mengakses melalui bener bener maupun sosial media Desa Junrejo.

Kata Kunci: Pemerintahan Berbasis Good Governance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Awalnya terbelang timbulnya ide *good governance* pada Pemerintahan Desa berkaitan dengan paradigma baru dalam memandang Desa yang dijelaskan dalam UU nomor 22 tahun 1999 yang nantinya diperbaharui menjadi UU nomor 32 tahun 2004 dan pencabutan UU nomor lima tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa perlu adanya tatanan ulang untuk lebih mengedepankan faktor-faktor keberagaman, asal usul, kearifan lokal serta nilai-nilai tradisional. Paradigma tersebut mendorong Pemerintahan Desa lebih dewasa dalam mengembangkan desa sesuai dengan cerita alaminya.

Penyebab timbulnya paradigma tersebut ialah desa dilihat sebagai obyek yang diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan alur yang diinginkan oleh Pemerintahan. Melalui UU nomor lima tahun 1070 terkait pemerintah desa dilakukan persamaan yang mempunyai bentuknya dan sistemnya pemerintahan yang terdapat di desa. Penyebab dari pemberlakuan undang-undang tersebut menghilangkan keanekaragaman Desa, mengkerdikan perannya dan yang lebih memprihatinkan ialah desa tidak dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Paradigma lama tersebut tidak memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk pemerintahan desa diubah dengan lahirnya berbagi

Undang-undang yang lebih memihak kepada kepentingan masyarakat. Hal tersebut mendorong masyarakat desa berkreasi dalam menyampaikan gagasannya, kemampuannya, kreativitas, dan daya inovasi, sehingga desa mengalami stagnasi, beku dan keterpurukan. Walaupun Pemerintahan Desa menampung aspirasi masyarakat melalui wadah Lembaga Musyawarah Desa (LMD), namun wadah tersebut tidak berfungsi karena kepentingan Pemerintah selalu diutamakan.

Dari permasalahan paradigma lama tersebut maka timbulah sebuah sistem Pemerintahan yang disebut dengan reformasi. sehingga adanya reformasi semua sistem menuju kehidupan yang lebih baik. UU nomor tiga puluh dua tahun dua ribu empat terkait pemerintahan di daerah dengan pemberian akan ruang gerak yang terbilang besar untuk desa dalam melakukan pengurusan rumah tangganya sendiri, sehingga Desa lebih leluasa untuk mengembangkan kehidupan sesuai dengan aspirasi dari masyarakatnya.

Setelah dilakukan pemberlakuan UU pemerintahan desa dalam melakukan kesiapannya dalam melakukan pelayanan dan juga tingkat pembangunannya yang terdapat pada desa dimaknai dengan peran paling penting dalam pelayanan akan publik yang dilakukan dan diharuskan melakukan persiapan mampu atau tidaknya perangkat yang sudah ada di desa untuk melaksanakan perencanaan dan juga pelayanan dalam hal ini pembangunan dengan basisnya untuk masyarakatnya dengan tujuan

tercapainya desa yang terbilang mandiri dan mampu melakukan pemanfaatan akan teknologi dan juga informasi (Amir, 2020).

Fenomena penguatan Pemerintah Desa berbasis *good governance* lewat pelayanan akan publik yang dilakukan pemerintah di tingkat desa, dan bersyarat dengan berbagai masalah yang sangat mendasar diantaranya adalah keadaan akan prosedur yang terbilang sulit dan dengan waktu yang lama dan tidak pasti melalui harga dengan penyebabnya kesulitan akan pelayanan berdasarkan keadaan pada birokrasinya di desa dan masyarakat melakukan pencarian alternatifnya jalan dengan tujuan memperoleh pelayanan akan menentukan tambah atau tidaknya biaya yang akan diberikan (Maryam, 2017). Sekarang pelayanan akan publik memiliki berbagai kekurangan sesuai pernyataan dari Mohamad (2003) yang terbilang responsifnya kurang dan informasinya kurang dan juga koordinasinya kurang serta berkurangnya dan keluhan yang disampaikan dan juga aspirasi dari masyarakatnya.

Masalah terkait pelayanan yang nantinya akan diterima masyarakatnya terbilang martabatnya yang dilecehkan dalam negara sebagai sesama akan warga negaranya. Masyarakat yang dalam penempatannya kebutuhan akan bantuan dari pemerintah desa yang seharusnya nantinya masyarakat diharuskan tunduk pada peraturan birokrasinya dan juga kemauan dari aparat pemerintah dalam hal ini pejabat. Pada budaya dalam pelayanan yang dilakukan dalam sistemnya bentuk pengertiannya menuju kekuasaan. Melalui kondisi yang terjadi inilah

perlunya tindakan perbaikan budaya yang terbilang sudah mengakar dan kualitas dari sistem terselenggaranya pelayanan publik yang berkelanjutan dengan tujuan penguatan Pemerintah Desa terbilang berbasis *good governance* (Maryam, 2016).

Sesuai penjelasan itulah perlunya melakukan penelitian tentang **“Implementasi Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* Di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?
2. Faktor-Faktor Apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam Implementasi Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang menjadi pendukung atau penghambat dalam Implementasi Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Dijadikan pertimbangan ilmu yang nantinya akan ditingkatkan terkait implementasinya penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.
 - b. Mempunyai dalam penggunaan referensi dan memberikan ruang dan kesempatan untuk peneliti berikutnya dalam hal ini berfokus pada pelayanan dengan diimplementasikannya Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* Desa Junrejo Kecamatan Junrejo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk penulis dan juga peneliti, nantinya hasil dari riset dapat diaplikasikan di dunia kerja dalam hal ini pengimplementasian pelayanan akan publik dengan berdasarkan tujuannya seperti Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* Desa Junrejo.
 - b. Untuk pemerintah, sebagai bahan masukan mengenai Model Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
 - c. Bagi masyarakat, lebih memudahkan masyarakat ikut terlibat membantu kemajuan dari Model Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance* Desa Junrejo Kecamatan Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, V. (2018). *Pengaruh Good Governance, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survey Pada Skpd Kota Bandung)* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung).
- Ardiana, S. E., Suharyani, S., & Herlina, H. (2018). Hubungan Pola Asuh Wanita Karir Dengan Sikap Sosial Anak Usia Dini Di Perumahan Dinas Tni Al Kekalik Mataram. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3(2).
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3).
- Astuti, V. D. (2020). Analisis Kebutuhan Rak Penyimpanan Rekam Medis Aktif Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. *Jurnal Infokes (Informasi Kesehatan)*, 4(1), 97-107.
- Azlina, N., & Amelia, I. (2014). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2).
- Bab, I. (2014). Metodologi Penelitian.
- Bahari, C., & Suci, R. D. (2019). Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kinerja Proyek Pada Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus: Pada Cv. Gresik Mitra Teknik). *Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 8(1), 22-24.
- Basuki, Ananto; Shofwan. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, 2006, 2-127
- Firmansyah, I., & Widuri, E. L. (2014). *Subjective Well-Being Pada Guru Sekolah Luar Biasa (Slb)* (Doctoral Dissertation, Universitas Ahmad Dahlan).